

**EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS  
PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN  
JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh:**

**ICHA BUDIARTI**  
**2103100022**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ICHA BUDIARTI**  
NPM : 2103100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)  
PENGUJI II : **IDA MARTINELLY, SH., MM** (.....)  
PENGUJI III : **DR.DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

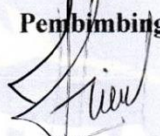
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **ICHA BUDIARTI**  
NPM : 2103100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan  
Dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota  
Medan

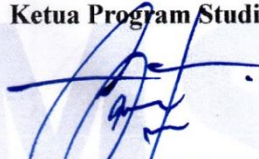
Medan, 19 April 2025

**Pembimbing**



**DR.DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**  
**NIDN: 0110097201**

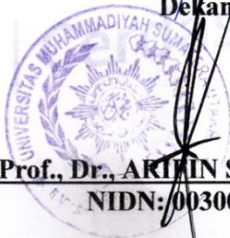
Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**  
**NIDN: 0122118801**

**Dekan**

**Assoc.,Prof., Dr., ARIJIN SALEH., S.Sos., MSP**  
**NIDN: 0030017402**



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Icha Budiarti**, NPM **2103100022**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 April 2025

Yang Menyatakan,



**Icha Budiarti**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga sekarang pada zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Medan". Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Kedua Orang Tua Penulis tercinta, Untuk cinta pertama ku Bapak Misman dan pintu surgaku Ibu Supriana atas rasa perhatian, kasih sayang dan pengorbanan materi serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Serta tak lupa pula diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom Selaku Wakil Dekan 1

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

4. Ibu Dr. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah S.Sos., M.Si, selaku sekretaris Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Dedi Amrizal S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
8. Bapak Ibu dosen dan Biro Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Ilmu Administrasi Publik yang memberikan masukan dan pembelajaran bagi penulis.
9. Kepada Bapak/Ibu Pegawai Dinas Perhubungan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan.
10. Kepada Adik-Adik ku tercinta Rifqa dan Ilmi Terimakasih selalu memberi dukungan kepada penulis, yang hingga saat ini selalu menjadi alasan untuk pulang kerumah.
11. Kepada Partner saya Yudhai Terimakasih atas dukungan dan bantuan selama penelitian hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



12. Kepada teman-teman saya Aria Hesti, Anisa Puspita, Windy Aulia, dan Cinta Salsabilla yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

13. Kepada Teman Satu Dospem Irva Rizky Tiana P, Sri Kartika Lubis dan Salsabila Andry Zarkasi yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

14. Kepada seluruh teman-teman kelas 8C IAP Pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 14 April 2025

Icha Budiarti

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN**

**Icha Budiarti**  
**NPM: 2103100022**

Fenomena juru parkir liar merupakan permasalahan yang sering dijumpai di berbagai kota besar, termasuk Kota Medan. Keberadaan mereka sering kali tidak terkoordinasi dengan instansi terkait dan tidak memiliki izin resmi, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti ketidaktertiban lalu lintas, ketidakjelasan tarif parkir, serta potensi pungutan liar. Penertiban juru parkir liar merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola perparkiran yang tertib dan berkelanjutan di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dengan instansi terkait dalam upaya penertiban juru parkir liar. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi horizontal antar lembaga seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP belum berjalan secara efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya komunikasi atau sosialisasi kepada juru parkir liar serta keterbatasan sumber daya manusia atau personel dalam penertiban juru parkir liar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan komunikasi atau sosialisasi kepada juru parkir liar dan peningkatan personel dalam penertiban juru parkir liar.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Koordinasi horizontal, Penertiban, Juru Parkir liar, Kota Medan*



## DAFTAR ISI

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                           | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                           | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                        | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                    | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                           | 5           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                         | 5           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                         | 5           |
| 1.5 Sistematika Penulisan.....                      | 6           |
| <b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>                 | <b>8</b>    |
| 2.1 Konsep Efektivitas .....                        | 8           |
| 2.1.1 Pengertian Efektivitas .....                  | 8           |
| 2.1.2 Ukuran Efektivitas.....                       | 9           |
| 2.1.3 Pendekatan Efektivitas .....                  | 11          |
| 2.1.4 Koordinasi Horizontal .....                   | 12          |
| 2.2 Efektivitas Koordinasi Horizontal .....         | 14          |
| 2.3 Juru Parkir Liar .....                          | 16          |
| 2.3.1 Jenis-Jenis Juru Parkir .....                 | 17          |
| 2.4 Anggapan Dasar .....                            | 19          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <b>20</b>   |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                           | 20          |
| 3.2 Kerangka Konsep .....                           | 21          |
| 3.3 Definisi Konsep.....                            | 22          |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian .....                   | 22          |
| 3.5 Informan/Narasumber .....                       | 23          |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....                   | 24          |
| 3.7 Teknik Analisis Data .....                      | 24          |
| 3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....                | 25          |
| 3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....                | 25          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>29</b>   |
| 4.1 Hasil Penelitian .....                          | 29          |
| 4.2 Deskripsi Narasumber .....                      | 29          |
| 4.3 Hasil Wawancara .....                           | 30          |
| 4.3.1 Komunikasi yang jelas dan terbuka .....       | 30          |
| 4.3.2 Tujuan Bersama.....                           | 32          |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.3 Keterlibatan Semua pihak.....                  | 35        |
| 4.3.4 Kepercayaan dan Hubungan Kerja yang Baik ..... | 37        |
| 4.4 Pembahasan.....                                  | 39        |
| 4.4.1 Komunikasi yang jelas dan terbuka .....        | 39        |
| 4.4.2 Tujuan Bersama.....                            | 40        |
| 4.4.3 Keterlibatan semua pihak .....                 | 41        |
| 4.4.4 Kepercayaan dan Hubungan Kerja yang Baik ..... | 42        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                           | <b>43</b> |
| 5.1 Simpulan .....                                   | 43        |
| 5.2 Saran .....                                      | 44        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>45</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                | <b>47</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 4.1</b> Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia ..... | 31 |
|--------------------------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 3.1</b> Kerangka Konsep.....         | 22 |
| <b>Gambar 3.2</b> Logo Dinas Perhubungan ..... | 27 |
| <b>Gambar 3.3</b> Struktur Organisasi .....    | 29 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Lampiran I    | : Draf Wawancara                              |
| Lampiran II   | : SK-1 Permohonan Penetapan Judul             |
| Lampiran III  | : SK-2 Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing |
| Lampiran IV   | : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi    |
| Lampiran V    | : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi      |
| Lampiran VI   | : Surat Permohonan Ganti Judul Skripsi        |
| Lampiran VII  | : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi         |
| Lampiran VIII | : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas         |
| Lampiran IX   | : Surat Izin Penelitian Dari BRIDA            |
| Lampiran X    | : Surat Terima Riset                          |
| Lampiran XI   | : Surat Selesai Riset                         |
| Lampiran XII  | : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi      |
| Lampiran XIII | : Surat Keterangan Bebas Pustaka              |
| Lampiran XIV  | : Surat LoA                                   |
| Lampiran XV   | : Dokumentasi                                 |
| Lampiran XVI  | : Daftar Riwayat Hidup                        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Banyak kota besar terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi masalah parkir liar yang semakin mendesak. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait memberikan dampak luas pada berbagai aspek kehidupan perkotaan. Di kota medan, masalah parkir liar disebabkan oleh kurangnya lahan parkir resmi, perilaku pengendara yang tidak tertib, minimnya pengawasan, serta keberadaan juru parkir liar.

Permasalahan ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyebabkan kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengakibatkan hilangnya pendapatan retribusi parkir bagi pemerintah daerah. Kurangnya ruang parkir resmi menjadi penyebab utama parkir liar. Banyak kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, tidak memiliki tempat parkir yang memadai. Selain itu ketidakdisiplinan pengendara juga berperan, di mana banyak pengendara memilih untuk parkir di tempat terdekat dengan tujuan mereka tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, karena alasan kenyamanan dan kecepatan. Keberadaan juru parkir liar memperburuk masalah. Juru parkir liar sering mengambil alih area publik untuk parkir tanpa izin resmi dan memungut biaya parkir secara ilegal. (Faradila et al., 2024)

Koordinasi juru parkir liar telah diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun Anggaran 2021- 2026. Renstra tersebut merupakan salah satu Upaya dinas perhubungan untuk mengatur

pengelolaan parkir di kota medan. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan parkir antara instansi pemerintah, pengelola parkir dan Masyarakat.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur tentang koordinasi. Di antaranya adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan izin penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir, koordinasi antar pihak terkait dalam penertiban lalu lintas angkutan jalan dan juru parkir, serta koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Seksi Parkir Wilayah I dan II terkait pengendalian dan keselamatan di area parkir.

Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan serangkaian tahapan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menertibkan juru parkir liar. Langkah Pertama yang dilakukan adalah melakukan Surat Menyurat dengan instansi terkait yaitu Satpol PP, Langkah Kedua Pemetaan Wilayah yang menjadi titik-titik rawan keberadaan juru parkir liar. Pemetaan ini dilakukan dengan melibatkan petugas di lapangan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sering digunakan sebagai lahan parkir ilegal. Setelah proses pemetaan selesai, Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban secara lebih efektif.

Sebelum melakukan penertiban, Dishub juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir yang tidak memiliki izin. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang aturan perparkiran yang berlaku, konsekuensi hukum bagi juru parkir liar, serta mekanisme pengelolaan parkir yang resmi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para juru parkir yang belum memiliki izin dapat mengurus legalitas mereka melalui mekanisme



yang telah ditetapkan.

Setelah sosialisasi dilakukan, Dishub bersama Satpol PP mulai melakukan penertiban di lapangan. Proses penertiban ini mencakup penertiban juru parkir liar yang masih beroperasi tanpa izin, penertiban marka atau tanda parkir ilegal, serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan. Setelah penertiban, Dishub melakukan evaluasi terhadap efektivitas tindakan yang telah diambil. Evaluasi ini mencakup pemantauan atau pengawasan terhadap wilayah yang telah ditertibkan untuk memastikan tidak ada lagi juru parkir liar yang kembali beroperasi. Jika ditemukan adanya indikasi juru parkir liar yang kembali beroperasi, maka Dishub akan melakukan tindakan lebih lanjut, baik melalui pendekatan persuasif maupun tindakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, Dishub juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi jangka panjang, seperti penataan ulang sistem perparkiran agar lebih tertib dan terorganisir.

Langkah-langkah tadi adalah cara Dinas Perhubungan untuk menertibkan juru parkir liar yang masih banyak ditemukan di Kota Medan. Namun demikian, permasalahan diatas masih belum berjalan dengan efektif seperti sosialisasi kepada juru parkir liar yang hingga saat ini masih marak dan beroperasi tanda izin atau ilegal, serta kurangnya pengawasan yang membuat Kawasan di kota medan terutama area pusat perkotaan sering kali mengalami permasalahan juru parkir liar. Jika masalah juru parkir liar tidak ditangani dengan baik dan efektif, hal ini bisa menimbulkan berbagai dampak yang mengganggu ketertiban serta mengurangi rasa nyaman masyarakat dalam beraktivitas. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya

ketidakteraturan dalam sistem perparkiran di Kota Medan. Tidak hanya itu, jika juru parkir liar terus dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan, maka akan membuka celah bagi tindakan pungutan liar atau bahkan tindak kriminal lainnya. Beberapa oknum mungkin memanfaatkan situasi ini untuk menarik keuntungan pribadi tanpa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk retribusi resmi. Akibatnya, potensi pendapatan daerah dari sektor parkir tidak bisa dioptimalkan, dan justru menjadi sumber ketidakadilan bagi pengelola parkir resmi yang telah mengikuti prosedur perizinan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan patroli untuk menertibkan juru parkir yang menarik uang retribusi dari masyarakat secara tidak semestinya. Namun nyatanya hingga saat ini masih ada juru parkir liar di kota medan. Selain itu, juru parkir liar juga tetap melakukan pengutipan kepada pengendara yang sudah bayar parkir berlangganan.

Permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya bisa kita pahami bersama bahwa permasalahan terkait penertiban juru parkir liar di kota medan belum efektif dilakukan secara optimal. Karena kurangnya pengawasan dan Penertibaan yang dilakukan. Dinas Perhubungan Kota Medan, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam urusan parkir, perlu benar-benar memperhatikan berbagai masalah yang sedang terjadi saat ini terkait pengelolaan parkir. Salah satu masalah yang mendesak adalah keberadaan juru parkir liar. Masalah ini harus segera ditangani karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan membuat kondisi lalu lintas di jalan-jalan Kota Medan semakin semrawut.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Medan”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disebutkan, peneliti kemudian merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Medan?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Bagaimana Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Medan”**

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **a. Bagi Kepala Dinas Perhubungan**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Perhubungan, terutama di Bidang Parkir, untuk menertibkan juru parkir liar di Kota Medan.

#### **b. Bagi Masyarakat Kota Medan**

Hasil penelitian ini berguna sebagai referensi untuk memahami lebih dalam bagaimana pemerintah bertindak dalam pengelolaan parkir menjadi tertib dan teratur.

c. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam berfikir secara ilmiah dan kemampuan menuliskan secara ilmiah dengan mengkaji teori.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

### **BAB II : Uraian Teoritis**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, pendekatan efektivitas, pengertian koordinasi (coordination), fungsi koordinasi, ciri-ciri koordinasi, koordinasi horizontal, juru parkir liar, jenis jenis juru parkir.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan/narasumber, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, waktu dan Lokasi penelitian.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana hasil penelitian disajikan berdasarkan jawaban dari narasumber.

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil dari penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsep Efektivitas**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Secara umum, "efektif" adalah kata dasar dari "efektivitas," yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara harapan dan hasil yang tercapai selalu berhubungan dengan seberapa efektif sesuatu itu. Selain itu, efektivitas juga bisa diartikan sebagai dampak atau hasil dari sebuah keberhasilan. (Yusliati, 2018)

Menurut (Aprianti, 2017) Efektivitas adalah elemen penting untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu organisasi dianggap efektif jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Untuk menilai apakah suatu organisasi berjalan dengan baik, kita bisa menggunakan konsep efektivitas. Konsep ini membantu kita memutuskan apakah organisasi perlu perubahan besar dalam struktur atau manajemennya. Secara sederhana, efektivitas berarti mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien, yang meliputi input, proses, dan output. Sumber daya tersebut termasuk ketersediaan tenaga kerja, fasilitas, serta metode dan model yang digunakan. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target

yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Sedangkan menurut (Amelia, 2023) Efektivitas bisa diartikan sebagai hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap tercapainya tujuan, semakin efektif pula organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Menurut Siagian, efektivitas berarti tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dengan menggunakan sumber daya yang telah disiapkan untuk menjalankan berbagai kegiatan.

Dari kutipan di atas, bisa disimpulkan bahwa efektivitas adalah faktor utama yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

### **2.1.2 Ukuran Efektivitas**

(Aprianti, 2017) Mengukur efektivitas organisasi bukan hal yang mudah, karena cara menilai efektivitas bisa berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing orang yang menilai. Misalnya, dari sisi produktivitas, seorang manajer produksi akan melihat efektivitas dari seberapa baik kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan. Efektivitas juga bisa diukur dengan membandingkan rencana yang sudah dibuat dengan hasil yang benar-benar tercapai. Namun, jika usaha atau langkah yang diambil tidak tepat dan tidak menghasilkan tujuan atau sasaran yang diinginkan, maka itu bisa dianggap tidak efektif.

Menurut (Gibson, 2020) kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus

ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Sedangkan menurut (Lestari et al., 2023) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dan hasil nyata yang telah dicapai. Namun, jika usaha atau hasil yang diperoleh tidak sesuai, sehingga tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak efektif. Menurut Siagian, ada beberapa kriteria atau ukuran untuk menilai apakah pencapaian tujuan itu efektif atau tidak, yaitu: a) Adanya tujuan yang jelas, yang bertujuan agar karyawan dapat fokus dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, sehingga tujuan organisasi bisa terwujud; b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai sasaran yang diinginkan, agar para pelaksana tidak tersesat dalam proses pencapaian tujuan organisasi; c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang kokoh, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan-tujuan dengan upaya pelaksanaan kegiatan operasional; d) Perencanaan yang matang, yang pada dasarnya berarti memutuskan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi di masa depan; e) Penyusunan program yang



tepat. Meskipun rencana yang baik telah disusun, rencana tersebut perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang jelas. Hal ini penting agar para pelaksana memiliki pedoman yang jelas untuk bertindak dan bekerja; f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerjanya; g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program, jika tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien, organisasi tidak akan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan yang baik akan membawa organisasi lebih dekat kepada tujuannya.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah dibuat dengan hasil yang tercapai. Proses untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu kesatuan. Dengan begitu, pencapaian tujuan akhir akan lebih terjamin.

### **2.1.3 Pendekatan Efektivitas**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk melihat seberapa berhasil suatu aktivitas dilakukan. Salah satu cara mengukurnya adalah dengan a) Pendekatan sasaran, yang fokus pada seberapa sukses sebuah lembaga dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran Efektivitas dengan pendekatan ini berarti menetapkan sasaran yang realistis untuk mencapai hasil yang maksimal berdasarkan tujuan resmi "Official Goal", dengan memperhatikan masalah yang mungkin timbul. Fokus

utamanya adalah pada output, yaitu mengukur seberapa berhasil program mencapai hasil yang telah direncanakan. Selain itu, ada juga b) Pendekatan sumber, yang menilai efektivitas berdasarkan kemampuan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. c) Pendekatan proses, di sisi lain, menilai efektivitas berdasarkan efisiensi dan kondisi internal lembaga. Pendekatan ini lebih menekankan pada kegiatan internal lembaga dan bagaimana sumber daya yang dimilikinya dikelola, tanpa terlalu memperhatikan faktor eksternal. Ini menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan organisasi tersebut.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal untuk mencapai output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

#### **2.1.4 Koordinasi Horizontal**

(Adolph, 2016) Koordinasi horizontal adalah usaha untuk menyatukan atau mengarahkan berbagai kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara sejajar antar pihak atau bagian dalam organisasi. kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. a) *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intem maupun secara ekstem pada unit-unit yang sama tugasnya; b) *Interrelated* berarti koordinasi antara berbagai badan atau unit dengan fungsi yang berbeda, namun saling bergantung dan memiliki kaitan, baik dari dalam maupun luar, dengan posisi yang

setara. Koordinasi horizontal ini cenderung sulit dilakukan karena tidak ada wewenang untuk memberi sanksi kepada pejabat yang sulit diajak bekerja sama, mengingat kedudukannya setingkat.

Menurut (Sajoto, 2015) Koordinasi dapat dipahami sebagai hubungan yang harmonis dan saling mempengaruhi antara kelompok-kelompok dalam melaksanakan pekerjaan, yang ditunjukkan melalui berbagai tingkat keterampilan. Dalam hal ini, koordinasi berarti kemampuan seseorang untuk mengatur berbagai tindakan menjadi satu kesatuan yang terorganisir dan efektif, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Koordinasi dan hubungan kerja saling berhubungan erat, karena koordinasi akan berjalan maksimal hanya jika hubungan kerja terjalin dengan baik. Hubungan kerja itu sendiri adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi yang berjalan dengan baik, yaitu yang efektif dan efisien. Koordinasi berfungsi untuk menyatukan berbagai kegiatan dari setiap bagian dalam organisasi, agar organisasi dapat beroperasi sebagai satu kesatuan yang solid dalam menjalankan tugas-tugasnya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Menurut (Binti Ulfatul Jannah, 2024) koordinasi horizontal adalah koordinasi antar pihak yang memiliki kedudukan setara. Contohnya, koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro perencanaan di suatu departemen dengan kepala direktorat bina program di setiap direktorat jenderal dalam departemen tersebut.

Menurut (Ayu et al., 2021) Koordinasi adalah upaya untuk menyatukan kegiatan antar unit kerja dalam organisasi, agar semua bagian dapat bekerja bersama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, ada beberapa jenis koordinasi, yaitu: a) Koordinasi Horizontal, yaitu penyelarasan kerja yang harmonis dan sinkron antara lembaga yang setara; b) Koordinasi Vertikal, yaitu penyelarasan kerja yang harmonis dan sinkron antara lembaga yang setara dengan lembaga yang lebih rendah tingkatannya; c) Koordinasi Fungsional, yaitu penyelarasan kerja sama yang harmonis dan sinkron antar lembaga yang memiliki fungsi dan tugas yang serupa, seperti antara kepala bagian hubungan masyarakat. Koordinasi ini dilakukan oleh pejabat atau instansi lain yang memiliki tugas terkait berdasarkan fungsi tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Koordinasi horizontal adalah proses penyatuan kegiatan, mengkoordinasikan Tindakan-tindakan dalam mendukung keberhasilan kebijakan atau program yang melibatkan instansi pada Tingkat yang setara.

## **2.2 Efektivitas Koordinasi Horizontal**

Efektivitas koordinasi horizontal merujuk pada sejauh mana proses kerjasama dan sinkronisasi antara unit-unit, lembaga, atau instansi yang berada pada tingkat yang sama dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien, tanpa tumpang tindih tugas, dan dengan meminimalkan konflik. Efektivitas ini ditandai dengan kelancaran komunikasi, pembagian tugas yang jelas, pengambilan keputusan yang partisipatif, serta keselarasan kebijakan dan tindakan di antara para pihak.

Menurut (Robbins dan Coulter 2016) menjelaskan bahwa efektivitas koordinasi horizontal dipengaruhi oleh faktor komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah secara kolektif. Efektivitas akan tercapai jika masing-masing unit atau departemen memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan bersama dan adanya proses pengambilan keputusan yang partisipatif.

Untuk menilai efektivitas koordinasi horizontal, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan: a) Komunikasi yang jelas dan terbuka efektivitas koordinasi horizontal sangat bergantung pada kualitas komunikasi antar rekan sejawat. Jika informasi mengalir dengan lancar dan jelas, kolaborasi akan lebih efektif, mengurangi kesalahan dan duplikasi tugas; b) Tujuan bersama semua pihak yang terlibat dalam koordinasi horizontal perlu memiliki pemahaman dan tujuan yang sama, agar mereka dapat bekerja ke arah yang serupa. Tanpa keselarasan tujuan, koordinasi akan terhambat; c) Keterlibatan semua pihak koordinasi horizontal yang efektif membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Keinginan untuk berkolaborasi dan berbagi ide atau solusi juga menjadi kunci dalam mencapainya; d) Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik meningkatkan kepercayaan antar individu atau tim sangat mempengaruhi efektivitas koordinasi horizontal. Jika ada rasa saling percaya, mereka lebih cenderung berbagi informasi, meminta bantuan, dan bekerja sama dengan lebih lancar.

#### Manfaat Koordinasi Horizontal yang Efektif

- a. Meningkatkan efisiensi: Mengurangi pekerjaan berulang atau tumpang tindih.
- b. Mempercepat pengambilan keputusan: Proses komunikasi yang lebih cepat memungkinkan keputusan lebih cepat.

- c. Meningkatkan inovasi: Kolaborasi antar tim yang memiliki keahlian berbeda dapat memunculkan solusi kreatif.
- d. Meningkatkan kepuasan kerja: Lingkungan kerja yang kooperatif meningkatkan motivasi dan kepuasan individu.

Dalam ringkasan diatas dapat disimpulkan, efektivitas koordinasi horizontal berperan penting dalam menciptakan sinergi antar bagian organisasi, yang dapat meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan Bersama.

### **2.3 Juru Parkir Liar**

Kegiatan parkir liar biasanya dilakukan oleh beberapa oknum dalam masyarakat. Oknum adalah orang yang bertindak sewenang- wenang. Juru parkir liar atau biasa disebut juru parkir tidak resmi tersebut bertindak sendiri sebagai juru parkir. Mereka hanya memanfaatkan peluang adanya lahan yang kosong dan tidak memiliki juru parkir resmi. parkir liar sebagai bentuk penyalahgunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan aturan tata kota atau lalu lintas. Parkir liar tidak hanya merugikan pengguna jalan lain, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, seperti kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan. parkir liar sebagai aktivitas parkir yang melanggar ketentuan tata kelola ruang dan pengaturan lalu lintas kota. Parkir liar biasanya disebabkan oleh kurangnya fasilitas parkir yang memadai di area tertentu, dan sering kali terjadi di daerah komersial atau pusat aktivitas perkotaan. (Soge, 2019)

Menurut (Oszaer et al., 2023) Seorang juru parkir seharusnya memenuhi beberapa syarat penting, antara lain; bersikap sopan dan ramah, memakai atribut lengkap seperti ID card, rompi, celana panjang, dan kaos berkerah, serta mampu dengan cekatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir.

Selain itu, juru parkir juga harus mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan parkir. Sementara itu, juru parkir liar biasanya tidak memakai seragam, berjaga di tempat yang bukan area parkir resmi, dan sering hanya muncul saat pemilik kendaraan akan pergi, lalu meminta uang parkir. Parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain.

Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Juru parkir tidak resmi (ilegal) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di unit pengelola parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya pun tidak resmi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Juru parkir liar adalah individu atau kelompok yang mengelola dan menarik biaya parkir di tempat umum tanpa izin resmi dari pemerintah atau otoritas terkait.

### **2.3.1 Jenis-Jenis Juru Parkir**

Juru Parkir terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

#### **a. Juru Parkir Resmi**

Juru parkir resmi disebut juga juru parkir legal. Juru parkir legal adalah mereka yang bekerja di bawah pengawasan pemerintah setempat. Mereka telah melalui proses seleksi, mengikuti pelatihan sebagai juru parkir, dan menerima perlengkapan

resmi seperti rompi, peluit, serta karcis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebelum resmi menjadi juru parkir mereka harus memenuhi syarat- syarat yang telah dibuat oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon juru parkir sebagai berikut:

- 1) Bersedia mematuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.
- 2) Sehat jasmani dan rohani dan standar umur 17 tahun sampai masih mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik.
- 3) Bersedia memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir setiap melakukan pemungutan dan memberikan pelayanan dengan baik serta tidak bersifat arogansi kepada pengguna jasa parkir.
- 4) Bersedia melaksanakan tugas perparkiran seperti tidak akan memarkir kendaraan di atas trotoar atau melampaui garis marka parkir.
- 5) Bersedia tidak akan melakukan kegiatan lain selain perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin dari Direksi Perusahaan Daerah.
- 6) Bersedia tidak akan meninggalkan lokasi parkir dan tidak menyerahkan rompi dan Id. Card ke orang lain tanpa persetujuan dari pihak Perusahaan Daerah.
- 7) Bersedia mematuhi target setoran setiap hari yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Parkir.

b. Juru Parkir Liar/Tidak Resmi

Juru parkir liar adalah orang yang mengatur parkir kendaraan tapi bukan petugas resmi. Mereka tidak terdaftar oleh koordinator, tidak pernah ikut pelatihan, dan atribut yang dipakai bukan dari Perusahaan Daerah Parkir.



Mereka bekerja sendiri tanpa izin resmi, dan uang dari hasil parkir langsung mereka ambil sendiri, tidak masuk ke kas daerah sesuai aturan yang berlaku. Juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa pelatihan khusus, dan semuanya dipelajari sendiri secara otodidak.

Dapat disimpulkan bahwa Jenis-jenis juru parkir memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan ruang parkir dan ketertiban lalu lintas. Juru parkir resmi dan swasta cenderung mendukung pengelolaan parkir yang terstruktur dan aman, sementara juru parkir liar dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, seperti gangguan lalu lintas, potensi konflik, dan hilangnya pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan juru parkir, termasuk penertiban dan pengawasan juru parkir liar, menjadi penting untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik di kota-kota besar seperti Medan.

## **2.4 Anggapan Dasar**

Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir liar sudah berjalan, Namun Penertiban juru parkir liar di Kota Medan menjadi tantangan besar yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak di dalam Dinas Perhubungan. Dengan dalam penerapannya Dinas Perhubungan dapat menetapkan satu konsep yang dikuatkan oleh teori Robbins dan Coulter melalui kategorisasi, Oleh sebab itu koordinasi horizontal dapat di implementasikan melalui konsep tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Ali et al., 2023) Penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami makna di balik suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk mendalami dan memahami fenomena yang sedang diteliti. Dalam prosesnya, peneliti melakukan berbagai langkah penting, seperti menyusun pertanyaan, mengatur cara pengumpulan data secara spesifik, menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus sampai ke gambaran yang lebih umum, lalu menarik makna dari data tersebut. Menurut (Amrizal, 2022) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain- lain. Selanjutnya Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengolah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Prosesnya dimulai dengan meninjau dan mempelajari seluruh data yang ada, lalu menyusunnya ke dalam bagian-bagian tertentu. Setelah itu, data dikategorikan, diperiksa keakuratannya, lalu dianalisis dan ditafsirkan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

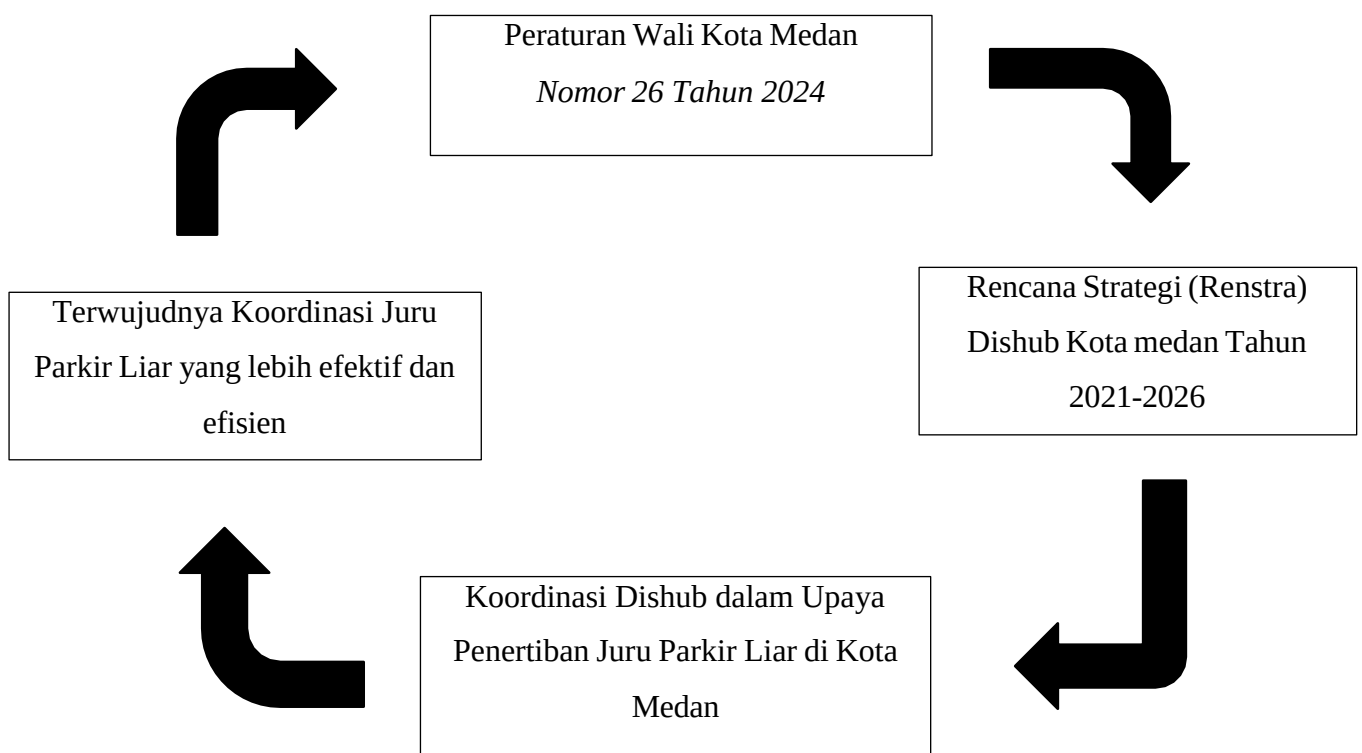
Sedangkan Menurut (Saputra, 2022) Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami berbagai peristiwa atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Cara memahaminya adalah dengan menggambarkan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi, biasanya lewat uraian kata-kata. Dari proses ini, diharapkan muncul pemahaman yang mendalam yang bisa berkembang menjadi sebuah teori. (Wiratna, 2014)

### 3.2 Kerangka Konsep

Dari penjelasan di atas, bisa dibuat gambaran kerangka konsep seperti berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Definisi Konsep

- a) Efektivitas disimpulkan bahwa efektivitas adalah faktor utama yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- b) Koordinasi horizontal merupakan proses penyatuan kegiatan, mengkoordinasikan Tindakan-tindakan dalam mendukung keberhasilan kebijakan atau program yang melibatkan instansi pada Tingkat yang setara.
- c) Efektivitas koordinasi horizontal berperan penting dalam menciptakan sinergi antar bagian organisasi, yang dapat meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan Bersama.
- d) Juru parkir liar adalah individu atau kelompok yang mengelola dan menarik biaya parkir di tempat umum tanpa izin resmi dari pemerintah atau otoritas terkait.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi digunakan untuk memperjelas pengukuran variabel dalam penelitian, supaya kita bisa lebih mudah memahami dan menganalisisnya. Lewat proses ini, kita bisa melihat bagaimana sesuatu dimasukkan ke dalam kelompok tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, kategori yang dibuat membantu menjelaskan hubungan antara subjek dan objek dalam suatu konteks pengetahuan.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Komunikasi yang Jelas dan Terbuka

- b. Tujuan dan Visi Bersama
- c. Keterlibatan Semua Pihak
- d. Kepercayaan dan Hubungan Kerja yang Baik

### **3.5 Informan/Narasumber**

Agar data yang dibutuhkan bisa lengkap, peneliti perlu mencari narasumber yang bisa memberikan informasi yang relevan dan bersedia bekerja sama selama proses penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono (2016), narasumber adalah individu yang memberikan informasi terkait suatu topik atau fenomena yang sedang diteliti. Mereka tidak hanya menyuplai data, tetapi juga memberikan interpretasi dan pandangan berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Nama : Muhammad Zein Lubis  
 Jabatan : Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus  
 Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Medan  
 Umur : 46 Tahun
- b. Nama : Rusman  
 Jabatan : Kepala Seksi Perparkiran Wilayah II  
 Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Medan  
 Umur : 55 Tahun
- c. Nama : Azhari Panjaitan  
 Jabatan : Staf Bidang Perparkiran  
 Unit Kerja : Dinas Perhubungan

- Umur : 29 Tahun
- d. Nama : Muhammad Irfan Panjaitan
- Jabatan : Staf Bidang Perparkiran
- Unit Kerja : Dinas Perhubungan
- Umur : 32 Tahun
- e. Nama : Legiran
- Jabatan : Staf Lapangan
- Unit Kerja : Satpol PP
- Umur : 51 Tahun

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data adalah langkah penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara. Wawancara adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam tentang suatu topik. Dalam wawancara, pewawancara dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti memberikan pertanyaan yang terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian dan kebutuhan data.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014), analisis data adalah proses yang teratur untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, hasil penelitian di lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci menjadi unit-unit yang lebih kecil, serta melakukan sintesis untuk menyusun pola. Selanjutnya, peneliti akan memilih elemen-elemen yang penting untuk dipelajari dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan

adalah Analisis Data Kategorisasi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data mentah yang kompleks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas koordinasi horizontal dalam upaya penertiban juru parkir liar di Kota Medan.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, yang terletak di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari Februari hingga April 2025.

Sumber: [https://maps.app.goo.gl/pYx1u7UCvuD6G4Zj9?g\\_st=com.google.maps.preview.copy](https://maps.app.goo.gl/pYx1u7UCvuD6G4Zj9?g_st=com.google.maps.preview.copy)

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **a. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan**

Sebelum tahun 2002, Dinas Perhubungan Kota Medan awalnya dikenal sebagai Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR), yang beroperasi di bawah naungan LLAJR tingkat provinsi Sumatera Utara. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2002, sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak saat itu, lembaga ini dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan (Dishub Kota Medan).

#### **b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan**

Adapun visi dan misi dari Dishub Kota Medan sebagai berikut:

1. Visi Dishub Kota Medan adalah tercapainya transportasi kota Medan

yang handal, nyaman dan manusiawi di Sumatera Utara.

2. Misi Dishub Kota Medan adalah:

- a) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat.
- b) Mewujudkan sistem angkutan masal terpadu.
- c) Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan.
- d) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi.
- e) Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah

**c. Logo dan Makna Dinas Perhubungan Kota Medan**



**Gambar 3.2 Logo Dinas Perhubungan**

Lambang Kementerian Perhubungan merupakan simbol atau tanda yang mencerminkan kesatuan jiwa dan ikatan batin seluruh aparatur, sekaligus menjadi perwujudan dari misi luhur Kementerian Perhubungan dalam berkontribusi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Lambang ini terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan "Kementerian Perhubungan Republik Indonesia," yang melambangkan kesatuan, kebersamaan, dan koordinasi dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab Kementerian Perhubungan demi tercapainya tujuan nasional.



Makna dari logo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Roda bergerigi melambangkan sektor perhubungan darat.
2. Jangka melambangkan sektor perhubungan laut.
3. Burung garuda melambangkan sektor perhubungan udara.
4. Bulatan bumi melambangkan cakupan pelayanan jasa perhubungan.
5. Warna biru langit pada logo melambangkan kedamaian, sementara kuning melambangkan keagungan.

**d. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan**

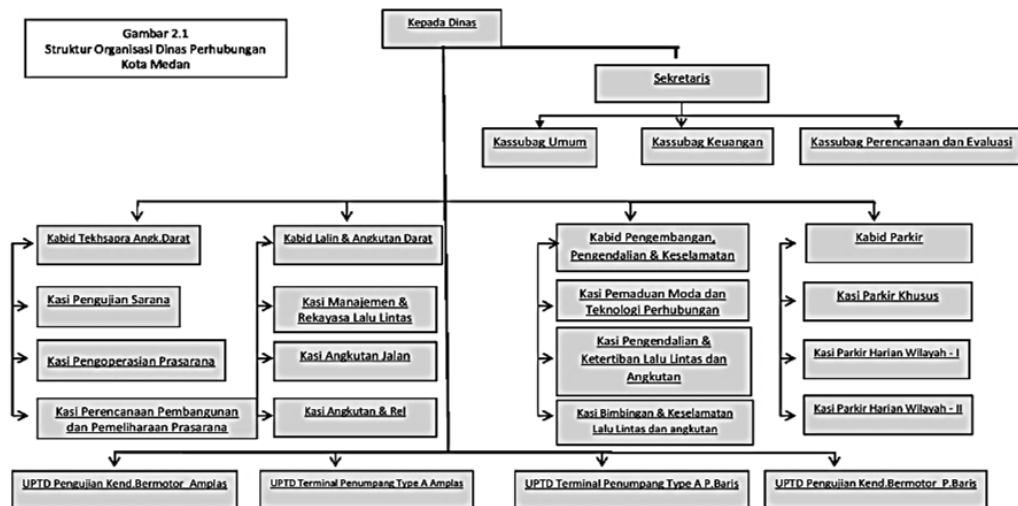
Menurut Peraturan Walikota Medan No. 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah ditentukan tugas dan fungsi dari dinas tersebut sebagai berikut:

- a. Dinas bertugas sebagai pelaksana pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
  - d. Pelaksanaan administrative Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### e. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar 3.3 Struktur Organisasi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini, akan membahas dan menyajikan data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada pendapat para informan dan berlangsung di Dinas Perhubungan Kota Medan, dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas koordinasi horizontal Dinas Perhubungan dalam upaya penertiban juru parkir liar. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk memahami objek yang diteliti dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Bab ini berisi penyajian dan analisis data hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang mana data diambil melalui wawancara atau tanya jawab dengan informan. Proses wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah dan mengumpulkan data yang mendukung penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan mengenai masalah yang ada dalam skripsi ini. Proses pengumpulan data berlangsung sekitar satu bulan.

#### **4.2 Deskripsi Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan, Kepala Seksi Perparkiran Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan, Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, dan Staf Lapangan Satpol PP.

Adapun Narasumber sebagai berikut:

| No | Nama                     | Pekerjaan                               | Usia     |
|----|--------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1  | Muhammad zein lubis      | Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus | 46 Tahun |
| 2  | Rusman                   | Kepala Seksi Perparkiran Wilayah II     | 55 Tahun |
| 3  | Azhari Panjaitan         | Staf Bidang Perparkiran                 | 29 Tahun |
| 4  | Muhammad Irfan Panjaitan | Staf Bidang Perparkiran                 | 32 Tahun |
| 5  | Legiran                  | Staf Lapangan                           | 51 tahun |

**Tabel 4.1 Deeskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia**

### **4.3 Hasil Wawancara**

#### **4.3.1 Komunikasi yang jelas dan terbuka**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, sebagai Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Senin, 24 Februari 2025, pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting dalam koordinasi penertiban juru parkir liar. Dinas Perhubungan memastikan hal ini dengan beberapa langkah. Pertama, Dinas Perhubungan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kepolisian untuk menyamakan persepsi dan strategi penertiban. Kedua, Dinas Perhubungan menggunakan saluran komunikasi yang efektif, seperti grup WhatsApp dan sistem laporan digital terkait evaluasi hasil, agar informasi dapat tersebar dengan cepat dan akurat. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir itu sendiri, walaupun Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi masih ada saja juru parkir yang beroperasi secara ilegal.

Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi terkait dan melibatkan media dalam penyebarluasan informasi kepada publik. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penertiban dilakukan secara terkoordinasi, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman sebagai Kepala Seksi Perparkiran Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Rabu, 12 Maret 2025, pukul 12.00 WIB, beliau mengatakan hal yang sama, Dinas Perhubungan juga melakukan komunikasi dengan cara surat menyurat kepada dinas yang terkait dalam penertiban juru parkir liar ini serta melakukan rapat koordinasi, dalam komunikasi ini Dinas Perhubungan dan instansi terkait melakukan evaluasi yang transparansi terkait penertiban juru parkir liar yang ada di kota medan sehingga masyarakat merasa aman tanpa adanya pungutan liar dari para jukir. Namun hingga saat ini masih ada juru parkir liar, Dinas Perhubungan dan instansi terkait terus melakukan razia rutin di berbagai titik rawan, sehingga mereka para jukir liar memahami aturan yang berlaku serta konsekuensi dari juru parkir liar.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah memastikan setiap pihak memahami perannya dalam penertiban juru parkir liar, selalu mengadakan rapat atau diskusi secara rutin untuk membahas kendala di lapangan, Menyusun strategi penertiban dan mengevaluasi hasil penertiban, Dinas Perhubungan selalu berusaha

berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Satpol PP agar proses penertiban berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan dalam upaya penertiban juru parkir liar, komunikasi antar organisasi memegang peranan penting untuk memastikan koordinasi yang efektif antara instansi, maka dari itu Dinas Perhubungan mengadakan rapat dengan pimpinan dan instansi terkait seperti Satpol PP, sosialisasi atau menyampaikan informasi kepada Masyarakat terkait aturan tarif parkir resmi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan untuk perbaikan kedepannya bagi dinas Perhubungan selaku pihak yang berwenang.

Kemudian, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Legiran sebagai Staf Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan komunikasi dalam penertiban ini menyurati Kerjasama untuk berkolaborasi atau koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang melakukan penertiban juru parkir liar, beliau juga mengatakan adanya rapat koordinasi yang membahas tentang kapan saja penertiban juru parkir liar dilakukan.

#### **4.3.2 Tujuan Bersama**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, sebagai Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Senin, 24 Februari 2025, pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan Tujuan Bersama dalam penertiban juru parkir liar diperlukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP, karena dalam tujuan bersama ini ingin

memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pengguna jalan, memastikan setiap Masyarakat mendapatkan pelayanan parkir yang sesuai standar, mengidentifikasi dan menata Lokasi parkir agar lebih tertib, Dinas Perhubungan juga memastikan bahwa instansi yang terkait dalam berkoordinasi ini memiliki tujuan yang sama serta setiap instansi memiliki perannya masing-masing untuk mengelola sistem perparkiran yang ada masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman sebagai Kepala Seksi Perparkiran Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Rabu, 12 Maret 2025, pukul 12.00 WIB, beliau mengatakan tujuan bersama ini untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dan tidak terganggu dengan adanya juru parkir liar dilapangan, penertiban ini juga bertujuan untuk menata ruang parkir agar lebih efisien, menciptakan sistem perparkiran yang aman dan transparan, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah dan nyaman ke fasilitas parkir yang resmi, serta memberikan pembinaan atau pelatihan bagi juru parkir agar dapat bekerja secara legal sesuai dengan regulasi yang berlaku pada Dinas Perhubungan, serta memastikan bahwa masing-masing pihak dalam berkoordinasi terlibat dalam tujuan yang sama dan memahami peran sesuai SOP instansi masing-masing dalam penertiban juru parkir liar.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan terhadap parkir liar, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi Masyarakat, Serta semua terlibat dalam penertiban ini baik Dinas Perhubungan dan Satpol PP, untuk

mewujudkan tujuan bersama dalam berkoordinasi yaitu dengan cara sosialisasi dan koordinasi rutin, melakukan penertiban sesuai SOP yang harus dipatuhi oleh instansi, melakukan evaluasi secara berkala dan rutin.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan Tujuan Bersama penertiban juru parkir liar ini Dinas Perhubungan ingin membangun sistem parkir berbasis teknologi untuk transparansi dan efisiensi, memberikan layanan parkir yang lebih tertata dan professional dan memastikan Masyarakat mendapatkan kepastian tarif parkir yang sesuai aturan. Dalam menjalankan perannya untuk tujuan bersama Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan perparkiran, serta menegakkan regulasi yang berlaku. Dinas Perhubungan juga memastikan semua pihak yang terlibat dalam bekoordinasi memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan ketertiban perparkiran.

Kemudian, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Legiran sebagai Staf Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan dalam tujuan bersama ini Satpol PP membantu dalam Tindakan penertiban terhadap juru parkir liar yang tidak mematuhi aturan, serta membantu Dinas Perhubungan melakukan penindakan terhadap juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi. Dalam berkoordinasi ini Dinas Perhubungan dan Satpol PP ingin mewujudkan kota medan yang tertib dan bebas dari juru parkir liar, tujuan ini hanya bisa tercapai dengan Tindakan yang tegas dan Kerjasama yang baik antar instansi.



#### **4.3.3 Keterlibatan Semua pihak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, sebagai Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Senin, 24 Februari 2025, pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan dalam penertiban juru parkir liar ini sangat diperlukan keterlibatan semua pihak, Dinas Perhubungan memastikan semua pihak terlibat dalam penertiban ini dan menjalankan tugas atau perannya masing-masing, sebagai pihak yang bertanggung jawab Dinas Perhubungan memiliki peran utama dalam mengatur kebijakan dan memastikan semua berjalan dengan sesuai aturan, dalam penertiban juga terdapat tantangan yaitu kurangnya sumber daya manusia atau personel. Satpol PP berperan dalam penegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam penertiban juru parkir liar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman sebagai Kepala Seksi Perparkiran Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Rabu, 12 Maret 2025, pukul 12.00 WIB, beliau mengatakan keterlibatan semua pihak tidak perlu dipastikan oleh Dinas Perhubungan. Namun, semua terlibat dalam kerjasama, Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan. Mengelola sistem parkir, serta mengawasi dan memastikan bahwa sistem parkir yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dinas Perhubungan dengan Satpol PP melakukan operasi langsung di lapangan untuk membubarkan atau menindak praktik parkir ilegal yang sering kali merugikan masyarakat dengan cara dimediasi, diberikan pengarahan dan membuat surat pernyataan, apabila dilakukan lagi akan diberikan sanksi yang lebih tegas lagi.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak melalui koordinasi yang intensif dengan berbagai instansi terkait, seperti Satpol PP. dalam memastikan ini Dinas Perhubungan melakukan rapat koordinasi secara berkala dan melakukan operasi gabungan untuk menertibkan juru parkir liar, dalam melakukan penertiban tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah juru parkir itu sendiri yang tidak mau ditertibkan. Dalam berkoordinasi kontribusi antar instansi sangat signifikan karena membantu dalam penegakkan peraturan dan penertiban langsung dilapangan serta bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi Masyarakat.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan keterlibatan semua pihak dalam penertiban juru parkir liar sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan Sejahtera bagi Masyarakat. Penertiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan semata, tetapi melibatkan instansi lainnya seperti Satpol PP untuk menciptakan sistem parkir yang tertib dan teratur. Kontribusi antar instansi baik Dinas Perhubungan maupun Satpol PP sangat besar karena membantu sebagai pengawasan utama dan membantu dalam pengamanan saat razia operasi berlangsung.

Kemudian, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Legiran sebagai Staf Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, pada hari

Kamis, 13 Maret 2025, pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan keterlibatan semua pihak mencakup dengan koordinasi rutin, operasi gabungan secara berkala yang melibatkan Dinas Perhubungan untuk menindak juru parkir liar dilapangan. Dalam setiap operasi, koordinasi antar instansi dimulai dengan rapat untuk menentukan strategi pelaksanaan, pembagian tugas, serta identifikasi titik-titik rawan juru parkir liar yang harus ditertibkan.

#### **4.3.4 Kepercayaan dan Hubungan Kerja yang Baik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, sebagai Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Senin, 24 Februari 2025, pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan Dinas Perhubungan selalu menjaga komunikasi yang intensif dan transparan dengan cara rapat rutin forum diskusi, serta penggunaan grup komunikasi digital untuk memastikan setiap Tindakan dalam penertiban juru parkir liar. Selain itu, Dinas Perhubungan mengutamakan prinsip keterbukaan dan berbasis data dalam setiap Langkah yang diambil, sehingga kepercayaan antar instansi tetap terjaga. Dalam mempertahankan hubungan kerja yang baik Dinas Perhubungan mengedepankan prinsip komunikasi serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman sebagai Kepala Seksi Perparkiran Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Rabu, 12 Maret 2025, pukul 12.00 WIB, beliau mengatakan untuk menjaga kepercayaan yang baik yaitu melakukan komunikasi yang transparan dan terstruktur sehingga menciptakan kepercayaan yang baik dan hubungan kerja yang baik. Dalam membangun kepercayaan yang baik Dinas Perhubungan harus selalu terbuka

untuk menerima masukan dan saran baik dari masyarakat serta instansi terkait, dengan memiliki kepercayaan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, serta dapat meningkatkan kualitas kerja yang bagus. Dinas Perhubungan akan terus membangun dan meningkatkan kepercayaan dan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak terkait dalam berkoordinasi.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dengan pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan komunikasi yang efektif dan juga komunikasi yang terstruktur, seperti pertemuan rutin dengan pihak terkait, seperti Satpol PP. Dinas Perhubungan juga menggunakan teknologi komunikasi seperti aplikasi pesan dan email untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efektif. Selain itu Dinas Perhubungan memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang sama dan dapat bekerja sama dalam penertiban juru parkir liar. Dinas Perhubungan juga melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa hubungan kerja yang baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan Panjaitan sebagai Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan Dinas Perhubungan selalu menjunjung tinggi komunikasi yang terbuka, jujur dan saling menghargai. Setiap kegiatan penertiban, kami awali dengan rapat koordinasi, agar semua pihak seperti Satpol PP memiliki pemahaman yang sama agar tidak terjadi

miskomunikasi di lapangan. Dalam menjalin hubungan kerja yang baik Dinas Perhubungan rutin menjalin komunikasi dengan rekan-rekan dari instansi lain. Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik adalah pondasi utama dalam penertiban juru parkir liar.

Kemudian, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Legiran sebagai Staf Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan Kepercayaan itu sangat penting, apalagi saat kita melakukan tugas penertiban di lapangan yang melibatkan banyak pihak. Dalam setiap kegiatan, kami dari Satpol PP selalu menjalin komunikasi terbuka dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan dan instansi lainnya. Kami harus saling percaya bahwa masing-masing menjalankan peran dengan tanggung jawab masing-masing. Selama pelaksanaan kegiatan, hubungan kerja tetap dijaga dengan komunikasi yang aktif. Setelah kegiatan selesai, evaluasi bersama juga dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kerja sama ke depan.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Komunikasi yang jelas dan terbuka**

Komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan bagian penting dalam proses manajerial. Mereka menekankan bahwa komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan dipahami sebagaimana dimaksud oleh pengirimnya. Dalam konteks komunikasi yang jelas dan terbuka, menyoroti beberapa hal penting yaitu, Kejelasan (*Clarity*) Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan langsung pada inti pesan. Keterbukaan (*Openness*) Terbuka dalam komunikasi berarti menciptakan

suasana di mana informasi bisa mengalir bebas, tanpa rasa takut akan hukuman atau penolakan. Ini mencakup kesediaan untuk mendengarkan umpan balik, kritik, atau ide dari bawahan maupun rekan kerja. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kerja sama tim, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi.

Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka hal ini dipastikan dengan beberapa Langkah Pertama, Dinas Perhubungan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kepolisian untuk menyamakan persepsi dan strategi penertiban. Kedua, Dinas Perhubungan menggunakan saluran komunikasi yang efektif, seperti grup WhatsApp dan sistem laporan digital terkait evaluasi hasil, agar informasi dapat tersebar dengan cepat dan akurat. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir itu sendiri, walaupun Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi masih ada saja juru parkir yang beroperasi secara ilegal. Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi terkait dan melibatkan media dalam penyebaran informasi kepada publik. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penertiban dilakukan secara terkoordinasi, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

#### **4.4.2 Tujuan Bersama**

Menyatakan bahwa tujuan bersama adalah aspirasi kolektif dari para pelaku yang menciptakan rasa takdir bersama. Tujuan ini berfungsi sebagai kekuatan pemersatu yang memungkinkan koordinasi upaya dan kerja sama untuk

manfaat bersama. Lebih dari sekadar tujuan yang didokumentasikan, tujuan bersama mencerminkan keyakinan bahwa kepentingan individu terwakili dalam kelompok sosial, sehingga bekerja demi kelompok juga memajukan kepentingan pribadi.

Dinas Perhubungan juga memastikan bahwa instansi yang terkait dalam berkoordinasi ini memiliki tujuan yang sama serta setiap instansi memiliki perannya masing-masing untuk mengelola sistem perparkiran yang ada masing, serta memastikan bahwa masing-masing pihak dalam berkoordinasi terlibat dalam tujuan yang sama dan memahami peran sesuai SOP instansi masing-masing dalam penertiban juru parkir liar.

#### **4.4.3 Keterlibatan semua pihak**

Keterlibatan semua pihak menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dan kepercayaan. Ini mendukung kerja sama, koordinasi, dan kohesi sosial antar anggota masyarakat atau organisasi.

Dinas Perhubungan memastikan semua pihak terlibat dalam penertiban ini dan menjalankan tugas atau perannya masing-masing, sebagai pihak yang bertanggung jawab Dinas Perhubungan memiliki peran utama dalam mengatur kebijakan dan memastikan semua berjalan dengan sesuai aturan. Maka dari itu diperlukannya koordinasi antar instansi seperti berkoordinasi kepada Satpol PP, Satpol PP berperan dalam penegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam penertiban juru parkir liar, keterlibatan semua pihak mencakup dengan koordinasi rutin, operasi gabungan secara berkala yang melibatkan Dinas Perhubungan untuk menindak juru parkir liar dilapangan. Dalam setiap operasi, koordinasi antar

instansi dimulai dengan rapat untuk menentukan strategi pelaksanaan, pembagian tugas, serta identifikasi titik-titik rawan juru parkir liar yang harus ditertibkan.

#### **4.4.4 Kepercayaan dan Hubungan Kerja yang Baik**

Menekankan bahwa kepercayaan dalam hubungan kerja menciptakan dasar bagi kolaborasi, pengambilan risiko interpersonal, dan efektivitas tim. Ketika ada kepercayaan, karyawan lebih terbuka, saling mendukung, dan bersedia menerima tanggung jawab bersama, Sedangkan hubungan kerja yang baik menurut (Robbins dan Judge 2021) Hubungan kerja yang baik dibangun atas dasar komunikasi efektif, rasa saling menghargai, dan pemahaman akan peran masing-masing. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kerja sama dan meningkatkan produktivitas.

Dinas Perhubungan selalu menjaga komunikasi yang intensif dan transparan dengan cara rapat rutin forum diskusi, serta penggunaan grup komunikasi digital untuk memastikan setiap Tindakan dalam penertiban juru parkir liar. Selain itu, Dinas Perhubungan mengutamakan prinsip keterbukaan dan berbasis data dalam setiap Langkah yang diambil, sehingga kepercayaan antar instansi tetap terjaga. Dalam mempertahankan hubungan kerja yang baik Dinas Perhubungan mengedepankan prinsip komunikasi serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan yang dilakukan. Dalam membangun kepercayaan yang baik Dinas Perhubungan harus selalu terbuka untuk menerima masukan dan saran baik dari masyarakat serta instansi terkait, dengan memiliki kepercayaan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, serta dapat meningkatkan kualitas kerja yang bagus.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi horizontal di Dinas Perhubungan dalam menertibkan juru parkir liar di Kota Medan sudah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Kesimpulan ini didasarkan pada kategori penelitian yang telah dilakukan yaitu:

##### **1. Komunikasi Yang Jelas dan Terbuka**

Dapat disimpulkan bahwa telah diterapkan melalui rapat koordinasi rutin, penggunaan grup komunikasi digital, serta pelaporan berkala yang melibatkan pihak terkait seperti Satpol PP dan sudah melakukan sosialisasi pada juru parkir liar. Namun demikian, meskipun sosialisasi telah dilakukan kepada juru parkir liar, praktik parkir ilegal masih tetap berlangsung.

##### **2. Tujuan Bersama**

Dapat disimpulkan bahwa tujuan bersama yang ingin dicapai oleh seluruh pihak adalah terciptanya sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan bebas dari praktik ilegal. Hal ini sudah diupayakan melalui pembagian peran yang jelas dan penegakan aturan, tetapi masih diperlukan penyamaan persepsi dan komitmen yang lebih kuat antar instansi.

##### **3. Keterlibatan Semua Pihak**

Dapat disimpulkan keterlibatan semua pihak menunjukkan bahwa koordinasi sudah melibatkan Dishub, Satpol PP, dan unsur pengawasan

lainnya. Kegiatan razia gabungan dan penertiban telah dilakukan, namun belum memberikan hasil yang sepenuhnya optimal akibat keterbatasan personel, kurangnya pemetaan berkelanjutan, dan rendahnya kesadaran hukum dari juru parkir liar.

#### 4. Kepercayaan dan Hubungan Yang Baik

Dapat disimpulkan bahwa telah dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pertemuan rutin, dan evaluasi bersama. Namun, keberlangsungan hubungan kerja yang efektif masih tergantung pada konsistensi komunikasi dan tindakan lanjutan di lapangan.

### 5.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan beberapa saran terkait efektivitas koordinasi horizontal Dinas Perhubungan dalam menertibkan juru parkir liar di Kota Medan :

1. Bagi Dinas Perhubungan Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dengan memperkuat sistem pengawasan lapangan secara berkelanjutan, memperluas pemetaan wilayah rawan parkir liar, serta memperbarui pendekatan sosialisasi yang lebih persuasif dan edukatif, khususnya kepada juru parkir ilegal.
2. Bagi Instansi Terkait Disarankan untuk menjaga komunikasi dan pelibatan aktif dalam setiap kegiatan penertiban. dapat meningkatkan kehadiran di lapangan secara rutin agar memberikan efek jera kepada para pelanggar serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *GINTING, J. F. (2019). Analisis Koordinasi Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY)*. 1–23.
- Ali, K., Meliala, W. S., & Sinaga, C. N. (2023). Peran Pemerintahan Mukim Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(2), 77–86. <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i2.14276>
- Amelia, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 3(4), 59. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15340>
- Amrizal, M. P. A. K. dan D. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kesehatan Di Desa Pulau Sembilan ....* 1(2), 145–152. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18448>
- Aprianti, P. (2017). Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ayu, G., Irwan, I., Latif, A., & Sahar, S. (2021). Fungsi Koordinasi Terhadap Pelaksanaan Pemerintah Di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(1), 28–38. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i1.346>
- Binti Ulfatul Jannah, D. (2024). *P-issn: 2809-4506 e-issn: 2809-1264*. 3(2), 36–39.
- Faradila, C., Pranata, D. A., Arpani, P., & Nasution, R. E. (2024). *Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Medan*. 8, 25713–25718.
- Gibson JIL, J. I. J. D. (2001). Organisasi, terjemahan Agus Dharma. *Jakarta: Erlangga*, 120.

- Lestari, V. D., Manajemen, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Negara, K. (2023). Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Oszaer, R. J., Nendissa, R. H., & Tita, H. M. Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(1), 46–63. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9907>
- Sajoto. (2015). Hubungan Koordinasi Mata Kaki Terhadap Hasil Menendang Bola Ke Sasaran Pada Siswa Kelas VIII-1 Dwi Sejahtera Pekanbaru. *Repository Universitas Islam Riau*.
- Saputra, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi .... *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi* ..., 1(2), 127–136. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18512%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18512/SKRIPSI T. AFANIN SYIFA APRILIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18512%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18512/SKRIPSI%20T.%20AFANIN%20SYIFA%20APRILIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Soge, A. V. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 103–115.
- Yendra, L. D. M., & Kadarisman, Y. (2024). Kehidupan Juru Parkir Liar Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 267–276. <https://doi.org/10.62017/arima>
- Yusliati, L. A. dan. (2018). Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa. *Depok: PT Raja Grafindo Persada*, 5(3), 17–41.

# LAMPIRAN

*Ace*  
*Draft Wawancara*  
*20/25*  
*[Signature]*

#### DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

#### EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN

##### I. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan :
- d. Unit Kerja :
- e. Umur :

##### II. Waktu Penelitian

- a. Hari / Tanggal :
- b. Pukul :
- c. Lokasi :

##### KOMUNIKASI YANG JELAS DAN TERBUKA

1. Bagaimana sistem komunikasi yang di lakukan Dinas Perhubungan terkait penertiban juru parkir liar di Kota Medan?
2. Apakah ada rapat koordinasi atau media lain yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penertiban juru parkir liar?
3. Seberapa sering komunikasi dilakukan untuk evaluasi bersama terkait hasil penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

### **TUJUAN BERSAMA**

1. Bagaimana Peran Masing-Masing Pihak Dalam Mewujudkan Tujuan Bersama untuk menertibkan juru parkir liar di Kota Medan?
2. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam koordinasi memiliki tujuan yang sama dalam penertiban juru parkir liar Di kota Medan?
3. Apa Saja Tujuan Bersama yang ingin dicapai melalui koordinasi antar instansi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

### **KETERLIBATAN SEMUA PIHAK**

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani koordinasi dengan pihak antar instansi? bagaimana cara mengatasinya?
3. Seberapa besar kontribusi pihak antar instansi dalam mendukung penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

### **KEPERCAYAAN DAN HUBUNGAN KERJA YANG BAIK**

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dengan pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?
2. Apa strategi utama yang digunakan Dinas Perhubungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak?
3. Apakah ada pelatihan atau kegiatan internal yang mendukung penguatan hubungan kerja tim dalam penertiban juru parkir liar?

## **Pedoman Wawancara Informan**

**Nama** : Muhammad Zein Lubis  
**Jabatan** : Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus  
**Hari/Tanggal** : Senin/24 Februari 2025  
**Lokasi** : Dinas Perhubungan Kota Medan

### **a. Komunikasi yang jelas dan terbuka**

1. Bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan terkait penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab** : Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting dalam koordinasi penertiban juru parkir liar. Dinas Perhubungan memastikan hal ini dengan beberapa langkah. Pertama, Dinas Perhubungan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, Kedua melakukan komunikasi menggunakan grup whatsapp, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir itu sendiri, walaupun Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi masih ada saja juru parkir yang beroperasi secara illegal.

2. Apakah ada rapat koordinasi atau media lain yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Ya tentu nya pasti ada, sebelum kami melakukan penertiban terlebih dahulu kami membuat rapat koordinasi dan mengundang instansi terkait untuk datang dalam rapat koordinasi yang kami buat.

3. Seberapa sering komunikasi dilakukan untuk evaluasi bersama terkait hasil penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Ya Dinas Perhubungan melakukan sesering mungkin apalagi sekarang sudah ada media sosial atau grup whatsapp yang bisa melakukan komunikasi hasil evaluasi kapan saja.

### **b. Tujuan Bersama**

1. Bagaimana peran masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan bersama untuk menertibkan juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab**: Peran masing-masing ini pastinya diperlukan Kerjasama kalau sudah melakukan Kerjasama pastinya memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan tujuan itu dalam penertiban juru parkir liar.



2. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam koordinasi memiliki tujuan yang sama dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan

**Jawab :** Kami memastikan hal itu dalam Kerjasama, yang artinya pihak yang terlibat dalam koordinasi seperti Satpol PP juga memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan perparkiran yang lebih baik serta memberikan kenyamanan bagi Masyarakat.

3. Apa saja tujuan bersama yang ingin dicapai melalui koordinasi antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Ya pastinya ingin memberikan kenyamanan Masyarakat agar tidak ada lagi rebut-ribut dengan jukir liar, memastikan setiap Masyarakat dapat pelayanan parkir yang sesuai standar ingin menciptakan perparkiran kota medan yang aman dan transparan.

**c. Keterlibatan semua pihak**

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Dinas Perhubungan memastikan semua pihak terlibat dalam penertiban ini dengan cara melihat dari Kerjasama dan rapat, dalam menjalankan tugas atau perannya masing-masing, sebagai pihak yang bertanggung jawab Dinas Perhubungan memiliki peran utama dalam mengatur kebijakan dan memastikan semua berjalan dengan sesuai aturan.

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani koordinasi dengan pihak antar instansi? Bagaimana cara mengatasinya?

**Jawab :** Tantangan nya kurangnya sumber daya manusia atau personel dalam penertiban juru parkir liar, walaupun kurang personel harus tetap maksimal menertibkan jukir liar yang ada di kota medan.

3. Seberapa besar kontribusi pihak antar instansi dalam mendukung penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Sangat besar karena mereka sangat membantu dalam menertibkan dan bisa diajak kerja sama untuk menciptakan kenyamanan dalam perparkiran

**d. Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik**

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dengan pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Dinas Perhubungan selalu menjaga komunikasi yang intensif dan transparan dengan cara rapat rutin forum diskusi, serta penggunaan grup komunikasi digital untuk memastikan setiap Tindakan dalam penertiban juru parkir liar.

2. Apa strategi utama yang digunakan Dinas Perhubungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak?

**Jawab :** Tidak ada strategi, yang pasti nama nya sudah bekerja sama pasti memiliki hubungan kerja yang baik.

3. Apakah ada pelatihan atau kegiatan internal yang mendukung penguatan hubungan kerja tim dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Tidak ada, yang pastinya kami selalu mengevaluasi kerja sama kami sehingga hubungan kerja tim itu menjadi baik.

## **Pedoman Wawancara Informan**

**Nama** : Rusman  
**Jabatan** : Kepala seksi perparkiran wilayah II  
**Hari/Tanggal** : Rabu/12 Maret 2025  
**Lokasi** : Dinas Perhubungan Kota Medan

### **a. Komunikasi yang jelas dan terbuka**

1. Bagaimana sistem komunikasi yang di lakukan Dinas Perhubungan terkait penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab** : Dinas Perhubungan juga melakukan komunikasi dengan cara surat menyurat kepada dinas yang terkait dalam penertiban juru parkir liar ini serta melakukan rapat koordinasi, dalam komunikasi ini Dinas Perhubungan dan instansi terkait melakukan evaluasi yang transparansi terkait penertiban juru parkir liar yang ada di kota medan sehingga masyarakat merasa aman tanpa adanya pungutan liar dari para jukir. Namun hingga saat ini masih ada juru parkir liar.

2. Apakah ada rapat koordinasi atau media lain yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Ada, setiap kami mau melakukan pasti selalu rapat koordinasi dulu untuk penertiban, agar tau bahwa mana saja titik-titik rawan yang banyak jukir liar.

3. Seberapa sering komunikasi dilakukan untuk evaluasi bersama terkait hasil penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Sesering mungkin, maksimal 3 bulan sekali melakukan evaluasi terkait hasil penertiban itu .

### **b. Tujuan Bersama**

1. Bagaimana peran masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan bersama untuk menertibkan juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab:** Perannya memahami bahwa masing-masing pihak dalam berkoordinasi terlibat dalam tujuan yang sama serta dapat memahami peran sesuai SOP instansi masing-masing dalam penertiban juru parkir liar.

2. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam koordinasi memiliki tujuan yang sama dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Ya Namanya sudah bekerja sama pasti setiap instansi memahami peran dan tugasnya masing-masing dalam koordinasi apalagi ingin mencapai tujuan yang baik.

3. Apa saja tujuan bersama yang ingin dicapai melalui koordinasi antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Menciptakan kenyamanan masyarakat dan tidak terganggu dengan adanya juru parkir liar dilapangan, penertiban ini juga bertujuan untuk menata ruang parkir agar lebih efisien, menciptakan sistem perparkiran yang aman dan transparan, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah dan nyaman ke fasilitas parkir yang resmi.

**c. Keterlibatan semua pihak**

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Tidak memastikan, pasti kalau sudah bekerja sama sudah memahami keterlibatan dalam melakukan penertiban jukir liar.

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani koordinasi dengan pihak antar instansi? Bagaimana cara mengatasinya?

**Jawab :** Tantangan dalam berkoordinasi tidak ada, tetapi dalam koordinasi penertiban tantangannya dari jukir liar itu sendiri yang menolak untuk ditertibkan sehingga membuat kerusakan dan keributan saat ditertibkan.

3. Seberapa besar kontribusi pihak antar instansi dalam mendukung penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Sangat besar, karena instansi lain sangat membantu dalam penertiban juru parkir liar ini.

**d. Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik**

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dengan pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Untuk menjaga kepercayaan yang baik yaitu melakukan komunikasi yang transparan dan terstruktur sehingga menciptakan kepercayaan yang baik dan hubungan kerja yang baik.

2. Apa strategi utama yang digunakan Dinas Perhubungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak?

**Jawab :** Tidak ada strategi, tetapi Dinas Perhubungan akan terus membangun dan meningkatkan kepercayaan dan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak terkait dalam berkoordinasi.

3. Apakah ada pelatihan atau kegiatan internal yang mendukung penguatan hubungan kerja tim dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Tidak ada, kami melakukan dengan cara komunikasi saja baik hubungan kerja tim maupun evaluasi.

## **Pedoman Wawancara Informan**

**Nama** : Azhari Panjaitan  
**Jabatan** : Staf Bidang perparkiran  
**Hari/Tanggal** : Jum'at/21 Februari 2025  
**Lokasi** : Dinas Perhubungan Kota Medan

### **a. Komunikasi yang jelas dan terbuka**

1. Bagaimana sistem komunikasi yang di lakukan Dinas Perhubungan terkait penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab** : Selalu mengadakan rapat atau diskusi secara rutin untuk membahas kendala dilapangan, Menyusun strategi penertiban dan mengevaluasi hasil penertiban, Dinas Perhubungan selalu berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Satpol PP agar proses penertiban berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.

2. Apakah ada rapat koordinasi atau media lain yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Ada, dilakukan pada saat sebelum melakukan penertiban dan setelah penertiban untuk mengevaluasi hasil penertiban.

3. Seberapa sering komunikasi dilakukan untuk evaluasi bersama terkait hasil penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Sangat sering, karena setiap setelah melakukan penertiban itu wajib mengkomunikasikan evaluasi hasil penertiban.

### **b. Tujuan Bersama**

1. Bagaimana peran masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan bersama untuk menertibkan juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab**: Peran nya sesuai SOP masing-masing instansi untuk penertiban juru parkir liar ini.

2. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam koordinasi memiliki tujuan yang sama dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab** : Semua terlibat dalam penertiban ini baik Dinas Perhubungan dan

instansi terkait Satpol PP, untuk mewujudkan tujuan bersama dalam berkoordinasi yaitu dengan cara sosialisasi dan koordinasi rutin, melakukan penertiban sesuai SOP yang harus dipatuhi oleh instansi, melakukan evaluasi secara berkala dan rutin.

3. Apa saja tujuan bersama yang ingin dicapai melalui koordinasi antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Tujuan nya untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan terhadap parkir liar, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi Masyarakat.

**c. Keterlibatan semua pihak**

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak melalui koordinasi yang intensif dengan berbagai instansi terkait, seperti Satpol PP. dalam memastikan ini Dinas Perhubungan melakukan rapat koordinasi secara berkala dan melakukan operasi gabungan untuk menertibkan juru parkir liar.

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani koordinasi dengan pihak antar instansi? Bagaimana cara mengatasinya?

**Jawab :** Dalam melakukan penertiban tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah juru parkir itu sendiri yang tidak mau ditertibkan.

3. Seberapa besar kontribusi pihak antar instansi dalam mendukung penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Ya sangat besar karena tanpa adanya Kerjasama atau kolaborasi penertiban ini kurang efektif.

**d. Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik**

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dengan pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Dinas Perhubungan melakukan komunikasi yang efektif dan juga komunikasi yang terstruktur, seperti pertemuan rutin dengan pihak terkait, seperti

Satpol PP.

2. Apa strategi utama yang digunakan Dinas Perhubungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak?

**Jawab :** Tidak ada, tetapi Dinas Perhubungan juga melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa hubungan kerja yang baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Apakah ada pelatihan atau kegiatan internal yang mendukung penguatan hubungan kerja tim dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Tidak ada, tetapi Dinas Perhubungan juga selalu mengadakan rapat agar hubungan kerja tim tetap berjalan dengan baik.



## **Pedoman Wawancara Informan**

**Nama** : Muhammad Irfan Panjaitan  
**Jabatan** : Staf Bidang perparkiran  
**Hari/Tanggal** : Jum'at/21 Februari 2025  
**Lokasi** : Dinas Perhubungan Kota Medan

### **a. Komunikasi yang jelas dan terbuka**

1. Bagaimana sistem komunikasi yang di lakukan Dinas Perhubungan terkait penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab** : Komunikasi antar organisasi memegang peranan penting untuk memastikan koordinasi yang efektif antara instansi, maka dari itu Dinas Perhubungan mengadakan rapat dengan pimpinan dan instansi terkait seperti Satpol PP.

2. Apakah ada rapat koordinasi atau media lain yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Kalo rapat tentunya ada karena ingin memastikan pihak mana saja yang terlibat dihari itu untuk melakukan penertiban dan ingin melihat Dimana saja yang ada jukir liar nya.

3. Seberapa sering komunikasi dilakukan untuk evaluasi bersama terkait hasil penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Kalo untuk evaluasi kita selalu membahas setelah penertiban dilakukan melalui dengan cara rapat atau komunikasi di whatsapp grup.

### **b. Tujuan Bersama**

1. Bagaimana peran masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan bersama untuk menertibkan juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab:** Dalam menjalankan perannya untuk tujuan bersama Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan perparkiran, serta menegakkan regulasi yang berlaku. Dinas Perhubungan juga memastikan semua pihak yang terlibat dalam bekoordinasi memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan ketertiban perparkiran.

2. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam koordinasi memiliki tujuan yang sama dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Dinas Perhubungan juga memastikan semua pihak yang terlibat dalam bekoordinasi memiliki tujuan yang sama dengan cara SOP masing-masing untuk menegakkan ketertiban perparkiran.

3. Apa saja tujuan bersama yang ingin dicapai melalui koordinasi antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Dinas Perhubungan ingin membangun sistem parkir berbasis teknologi untuk transparansi dan efisiensi, memberikan layanan parkir yang lebih tertata dan professional dan memastikan Masyarakat mendapatkan kepastian tarif parkir yang sesuai aturan.

**c. Keterlibatan semua pihak**

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** keterlibatan semua pihak dalam penertiban juru parkir liar sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan Sejahtera bagi Masyarakat.

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani koordinasi dengan pihak antar instansi? Bagaimana cara mengatasinya?

**Jawab :** Tantangan nya adalah ya kendala dalam penertiban kurangnya personel dan jukir yang tidak mau ditertibkan.

3. Seberapa besar kontribusi pihak antar instansi dalam mendukung penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Kontribusi antar instansi baik Dinas Perhubungan maupun Satpol PP sangat besar karena membantu sebagai pengawasan utama dan membantu dalam pengamanan saat razia operasi berlangsung.

**d. Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik**

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dengan pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Setiap kegiatan penertiban, kami awali dengan rapat koordinasi, agar semua pihak seperti Satpol PP memiliki pemahaman yang sama agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan.

2. Apa strategi utama yang digunakan Dinas Perhubungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak?

**Jawab :** Dalam menjalin hubungan kerja yang baik Dinas Perhubungan rutin menjalin komunikasi dengan rekan-rekan dari instansi lain. Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik adalah pondasi utama dalam penertiban juru parkir liar.

3. Apakah ada pelatihan atau kegiatan internal yang mendukung penguatan hubungan kerja tim dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Tidak ada, karena hubungan kerja tim yang baik sudah cukup apabila sudah serung melakukan kerja sama antar instansi.

## **Pedoman Wawancara Informan**

**Nama** : Legiran  
**Jabatan** : Staf Lapangan Satpol PP  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 13 Maret 2025  
**Lokasi** : Satpol PP Kota Medan

### **a. Komunikasi yang jelas dan terbuka**

1. Bagaimana sistem komunikasi yang di lakukan Dinas Perhubungan terkait penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab** : Komunikasi dalam penertiban ini menyurati Kerjasama untuk berkolaborasi atau koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang melakukan penertiban juru parkir liar.

2. Apakah ada rapat koordinasi atau media lain yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Ada, rapat koordinasi yang membahas tentang kapan saja penertiban juru parkir liar dilakukan.

3. Seberapa sering komunikasi dilakukan untuk evaluasi bersama terkait hasil penertiban juru parkir liar?

**Jawab** : Sering dilakukan, apalagi setelah melakukan penertiban selalu melakukan evaluasi terkait hasil.

### **b. Tujuan Bersama**

1. Bagaimana peran masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan bersama untuk menertibkan juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab**: Perannya dalam penertiban ini sesuai tugas masing-masing agar terciptanya tujuan bersama dalam penertiban juru parkir liar di kota medan.

2. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam koordinasi memiliki tujuan yang sama dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab** : Dinas Perhubungan selalu memastikan kepada kami bahwa semua pihak yang terlibat dalam penertiban ini memiliki tujuan bersama.

3. Apa saja tujuan bersama yang ingin dicapai melalui koordinasi antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Dalam berkoordinasi ini Dinas Perhubungan dan Satpol PP ingin mewujudkan kota medan yang tertib dan bebas dari juru parkir liar, tujuan ini hanya bisa tercapai dengan Tindakan yang tegas dan Kerjasama yang baik antar instansi.

**c. Keterlibatan semua pihak**

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan keterlibatan semua pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Keterlibatan semua pihak mencakup dengan koordinasi rutin, operasi gabungan secara berkala yang melibatkan Dinas Perhubungan untuk menindak juru parkir liar dilapangan.

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani koordinasi dengan pihak antar instansi? Bagaimana cara mengatasinya?

**Jawab :** Tantangan nya dari juru parkir liar itu sendiri banyak alasan saat ditertibkan, Namun bagaimana pun cerita harus tetap ditertibkan.

3. Seberapa besar kontribusi pihak antar instansi dalam mendukung penertiban juru parkir liar di Kota Medan?

**Jawab :** Sangat besar karena, dalam setiap operasi koordinasi antar instansi dimulai dengan rapat untuk menentukan strategi pelaksanaan, pembagian tugas, serta identifikasi titik-titik rawan juru parkir liar yang harus ditertibkan.

**d. Kepercayaan dan hubungan kerja yang baik**

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dengan pihak antar instansi dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Kepercayaan itu sangat penting, apalagi saat kita melakukan tugas penertiban di lapangan yang melibatkan banyak pihak. Dalam setiap kegiatan, kami dari Satpol PP selalu menjalin komunikasi terbuka dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan dan instansi lainnya.

2. Apa strategi utama yang digunakan Dinas Perhubungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan semua pihak?

**Jawab :** Tidak ada strategi yang spesifik, namun kami harus saling percaya

bahwa masing-masing menjalankan peran dengan tanggung jawab masing-masing.

3. Apakah ada pelatihan atau kegiatan internal yang mendukung penguatan hubungan kerja tim dalam penertiban juru parkir liar?

**Jawab :** Tidak ada, namun selama pelaksanaan kegiatan, hubungan kerja tetap dijaga dengan komunikasi yang aktif. Setelah kegiatan selesai, evaluasi bersama juga dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kerja sama ke depan.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bisa ma' kan hasil belajar dan prestasi  
menjadi lebih unggul

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/13/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
@umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

SK-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 01 November... 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : ICHA BUDIARTI  
NPM : 2103100022  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,67

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No | Judul yang diusulkan                                                                                   | Persetujuan           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Strategi koordings horizontal dinas perhubungan dalam upaya penerjiban juru parkir liar dikota Medan   | Ya <i>[Signature]</i> |
| 2  | Peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kebersihan kota tebing tinggi |                       |
| 3  | Efektivitas pelayanan berbasis online dalam pemutusan kartu keluarga di dukcapil kota tebing tinggi    |                       |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
  2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 01 November... 2024

Ketua  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

(ANANDA MAHARAJA, S.Sos, M.Si  
NIDN: 0110097201

Pemohon,

(... Icha Budiarti ...)  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi: ...

D. DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si  
NIDN: 0110097201

010

PB: DEDI AMRIZAL M.Si





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

### SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nomor : 1995/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Sk-2

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 01 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ICHA BUDIARTI**  
N P M : 2103100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 010.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 01 November 2025.

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 06 Djumadil Awwal 1445 H  
08 November 2024 M

Dekan,



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Bertinggal.



Dipindai dengan CamScanner







**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia memuat surat ini agar diketahui  
hukum dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AA.KP/PTX/II/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 06 Januari ..... 2025

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ICHA BUDIARTI  
N P M : 2103100022  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 004/349/SK/IL3.AU/UMSU-03/E/2024.. tanggal 08 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

Strategi koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan Dalam  
Upaya Penertiban Jalan Parkir liar di kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wasalam.

Menyetujui :

Pembimbing

( Dr. Dedhi Zul. M. Si )

NIDN: 0112077201

Pemohon,

( Icha Budiarti )



Dipindai dengan CamScanner





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



| No. | NAMA MAHASISWA           | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENANGGAP                                 | PEMBIMBING                                | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI                                                                                                                  |
|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | ICHA BUDIARTI            | 2103100022            | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si. | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.           | STRATEGI KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN                                  |
| 22  | CINTA SALSABILA          | 2103100020            | Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.       | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si. | EFEKTIVITAS FUNGSI STAFFING DALAM TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL DI KANTOR BEA CUKAI BELAWAN KOTA MEDAN                                 |
| 23  | ARIO IVO RAYZIKIN        | 2103100043            | Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.       | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si. | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KOLEKTIF KOLEGIAL DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS PEGAWAI DI KANTOR PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT UNIT MEDAN    |
| 24  | RIZKY AKBAR SITORUS      | 2103100005            | SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.                  | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.           | FUNGSI ORGANIZING DALAM PENATAAN LOKASI DAN LINGKUNGAN AREA PEDAGANG DI PERUSAHAAN DAERAH PASAR HORAS JAYA (PDPH) KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 25  | IRVA RIZKY TIANA PRATIWI | 2103100008            | KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.                 | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.           | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN MENGEMIS DI KOTA KISARAN                                              |

Medan, 08 Rajab 1446 H  
08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)



hal : Permohonan Penggantian Judul Tugas Akhir  
Lampiran : 1 Lembar

Medan, 21 Januari 2025

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya bermaksud mengajukan permohonan revisi judul Skripsi yang telah diajukan sebelumnya.

Nama : ICHA BUDIARTI  
NPM : 2103100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Dosen Pembimbing : Dr. Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si.

Judul Skripsi yang sebelumnya diajukan:

**“STRATEGI KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN “**

Saya bermaksud merevisi judul menjadi:

**“EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN”**

Adapun alasan revisi judul ini karena Ingin Meneliti Sejauh Mana Efektivitas Penertiban Juru Parkir Liar

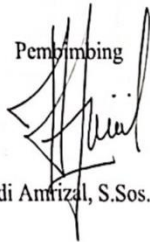
Demikian Surat permohonan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Pemohon



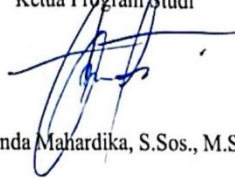
(Icha Budiarti)

Pembimbing



(Dr. Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



(Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP)





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nama lengkap : ICHA BUDIARTI  
NPM : 2103100022  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Jukir liar di kota medan

| No. | Tanggal    | Kegiatan Advis/Bimbingan    | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|-----------------------------|------------------|
| 1.  | 06/11-2024 | Penetapan Judul Skripsi     |                  |
| 2.  | 15/11-2024 | Bimbingan BAB I, II dan III |                  |
| 3.  | 21/11-2024 | Perbaikan BAB I             |                  |
| 4.  | 23/11-2024 | Perbaikan BAB II            |                  |
| 5.  | 09/12-2024 | Acc proposal skripsi        |                  |
| 6.  | 03/02-2025 | Bimbingan draft wawancara   |                  |
| 7.  | 20/02-2025 | Acc Draft wawancara         |                  |
| 8.  | 15/04-2025 | Bimbingan BAB IV dan V      |                  |
| 9.  | 17/04-2025 | Revisi BAB IV dan V         |                  |
| 10. | 19/04-2025 | Acc ujian meja hijau        |                  |

Medan, 10 April 2025

Dekan,  
Ananda Mahardika S.Sos, M.S.P  
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,  
Ananda Mahardika S.Sos, M.S.P  
NIDN: 0122110801

Pembimbing,  
Dr. Dra. Haniyati S.Sos., M.Si  
NIDN: 61160097201

CS Dipindai dengan CamScanner







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab tantangan agar disetujui  
sama dan langgengnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PTIAk.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baerli No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 312/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -,-

Hal : *Mohon Diberikan Izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 04 Sya'ban 1446 H

03 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan  
segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya  
Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perhubungan Kota  
Medan, atas nama :

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama mahasiswa              | : ICHA BUDIARTI                                                                                                   |
| N P M                       | : 2103100022                                                                                                      |
| Program Studi               | : Ilmu Administrasi Publik                                                                                        |
| Semester                    | : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025                                                                            |
| Judul Tugas Akhir Mahasiswa | : EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS<br>PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN<br>JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan  
terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.





## SURAT KETERANGAN RISET

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127  
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.medan.go.id  
Pos-el : dishub@medan.go.id

Medan, 24 Februari 2025

Nomor : 000.9/ 0702  
Lampiran : -  
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
di  
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah ; Nomor : 000.9/0747  
Tanggal 06 Februari 2025 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Icha Budiarti ; NIM :  
2103100022 ; Jurusan ; Ilmu Administrasi Publik Judul : Efektivitas Koordinasi Horizontal  
Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah  
diterima melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
u.p Kasubbag Kepegawaian Dan Umum

  
Imelda Marlina, SH.MSi  
(Pembina W/a)  
NIP.197403121998032003



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127  
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.Pemko medan.go.id  
Pos-el : dishub\_kota medan @medan.go.id

Medan, 16 April 2025

Nomor : 000.9 / 085  
Lampiran : -  
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
di  
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah; Nomor: 000.9/0747  
Tanggal 06 Februari 2025 Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset A.n Icha Budiarti  
; NIM : 2103100022 ; Jurusan ; Ilmu Administrasi Publik ; Judul Efektivitas  
Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar  
di Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah  
selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota  
Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
u.n Kasubag. Kepegawaian Dan Umum



Imelda Herlina, SH.MSi  
Pembina (I/IIa)  
NIP 197103121998032003





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 725/UND/II.3.AU/UMSU-03/IF/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

Sk-10



| No. | Nama Mahasiswa         | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI                              |                                   |                             | Judul Ujian Tugas Akhir                                                                                                                |
|-----|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                       | PENGUJI I                                | PENGUJI II                        | PENGUJI III                 |                                                                                                                                        |
| 16  | DIMAS ANDHIKA SEBAYANG | 2103100071            | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA. | AGUNG SAPUTRA, SS.os., MAP. | STRATEGI COORDINATING DINAS SDASMBK DALAM OPTIMALISASI PENATAAN KABEL UDARA DI WILAYAH KOTA MEDAN                                      |
| 17  | RISDAYU HAPSAH         | 2103100061            | Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.      | RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA. | AGUNG SAPUTRA, SS.os., MAP. | STRATEGI ORGANIZING DALAM PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG |
| 18  | ICHA BUDIARTI          | 2103100022            | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.           | IDA MARTINELLY, SH., MH.          | DEDI AMRIZAL, S.Sos., MSI.  | EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIR DI KOTA MEDAN                               |
| 19  | ERINA APRILIA          | 2103100073            | DEDI AMRIZAL, S.Sos., MSI.               | AGUNG SAPUTRA, SS.os., MAP.       | NALIL KHAIRIAH, S.IP, MPd.  | IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA MEDAN                                                           |
| 20  | DWI RITANTI            | 2103100069            | Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.      | DEDI AMRIZAL, S.Sos., MSI.        | NALIL KHAIRIAH, S.IP, MPd.  | IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI                                                                      |

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :  
Rektor  
Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum.

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Medan, 22 Syawal 1446 H

21 April 2025 M



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP-PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) [perpustakaan.umsu.ac.id](http://perpustakaan.umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Berprestasi  
Ela muna'awati kullu hi, aga dhorobutan  
nomor dan tanggalnya

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 01252/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : icha budiarti  
NPM : 2103100022  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Syawal 1446 H  
19 April 2025 M

Kepala Perpustakaan,

  
Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



#### LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Icha Budiarti

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 19, 2025

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)  
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891

1. Foto dengan Bapak Muhammad Zein Lubis selaku Inspektur sub koordinator parkir khusus



2. Foto dengan Bapak Rusman selaku Kepala seksi perparkiran wilayah II





**3. Foto dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Staf Bidang perparkiran**



**4. Foto dengan Bapak Muhammad Irfan Panjaitan selaku Staf Bidang perparkiran**



**5. Foto dengan Bapak Legiran selaku Staf lapangan Satpol  
PP**



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Icha Budiarti  
Tempat/Tanggal Lahir : Kerapuh, 03 Desember 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kerapuh dsn I kec. Dolok Masihul  
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Misman  
Ibu : Supriana

### **Riwayat Pendidikan**

- Tamat dari MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI Dolok Masihul, Tahun 2015, Berijazah
- Tamat dari MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI Dolok Masihul, Tahun 2018, Berijazah
- Tamat dari MADRASAH ALIYAH NEGERI Serdang Bedagai, Tahun 2021, Berijazah
- Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2021-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 02 Mei 2025

Icha Budiarti